



Strategi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Dalam Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 2016-2020

Mersi Homer

Universitas Indonesia

statistikmersi@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Juni 201x

Disetujui 20 Agustus 201x

Diterbitkan 26 Agustus 201x

Kata kunci:

Strategi; Ratio

kemandirian; Analisis

SWOT ; APBD; Kontribusi

PAD

Keywords :

Strategy; Independence

Ratio; SWOT Analysis ;

APBD; PAD contribution

ABSTRAK(10 PT)

Studi penelitian ini bertujuan untuk merinci kekuatan dan strategi Pemerintah Provinsi Papua Barat. Analisis Rasio Kemandirian digunakan merupakan analisis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Sedangkan analisis SWOT dalam penelitian ini adalah mengembangkan yang terbaik. Hasil penelitian ini menunjukkan Kemandirian Keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat masuk dalam kategori rendah sekali. Permasalahannya meliputi adalah masih terbatasnya sumberdaya ASN dalam pelayanan publik; sarana dan prasarana yang belum mencukupi, belum memadainya pengalihan kemampuan dari pendapatan asli daerah yang dimiliki, pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien

ABSTRACT(10 PT)

This research study aims to detail the strengths and strategies of the West Papua Provincial Government. The Independence Ratio Analysis used is the analysis used in the implementation of this research. While the SWOT analysis in this study is to develop the best. The results of this study indicate that Financial Independence sourced from the Regional Original Income of West Papua Province is in the very low category. The problems include the limited ASN resources in public services, inadequate facilities and infrastructure, insufficient multiplication of capabilities from local revenue owned; development of an inefficient regional financial management information system



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Diharapkan dengan melaksanakan otonomi daerah, daerah mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan umum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan dari masyarakat setempat (Republik Indonesia, 2004). Pemahaman atas Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang maupun kewajiban sebagai daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat (Sa'diyah & Putri, 2015). Otonomi daerah membutuhkan lebih dari sekedar mendelegasikan otoritas dari pemerintah pusat ke daerah. Hal ini tentu saja terkait erat dengan keuangan dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan (Rahmawati & Fajar, 2017).

Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Wijayanti & MM, 2017). Di dalam pelaksanaannya, tolok ukur keberhasilan otonomi daerah diukur berdasarkan kinerja ekonomi meliputi tiga aspek penting, yakni institusional, keuangan dan aparatur pemerintah. Dari ketiga aspek tersebut, kemampuan keuangan menjadi persoalan yang krusial dalam menentukan berkembang atau tidaknya otonomi daerah (Samad & Iyan, 2013). Sehingga untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, telah ditetapkan dalam UU desentralisasi fiskal tahun 2004, namun kemudian dicabut menjadi UU Pemda tahun 2014. Daerah saat ini sudah diberi kewenangan yang utuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah (Mangowal, 2013).

Pelimpahan kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat kepada daerah dalam segala urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat mengharuskan pemerintah daerah dapat mendayagunakan sumber daya daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan yang mandiri dari aspek keuangan. Untuk mendukung otonomi daerah yang terformat dalam desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah mampu menggali potensi yang ada guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan daerah tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat. Pendapatan daerah dibagi menjadi tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Hukum Lainnya.

Melalui otonomi daerah, diharapkan Pemerintah Provinsi Papua Barat mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki daerah guna mengatasi kesenjangan daerah. Percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang di dukung oleh ketersediaan anggaran. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat sendiri meliputi Pendapatan, Belanja, Belanja Menurut Fungsi dan Pembiayaan. Salah satu komponen APBD yang dipakai untuk Belanja Daerah adalah Komponen Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya Yang Sah. Karena pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap (Mawarni & Abdullah, 2013). Dimana Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia (Kainde, 2013). Dimana APBD juga sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam membelanjakan uang publik. Namun dalam penerapannya APBD perlu dilakukan perubahan-perubahan dalam tahun anggaran berjalan sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan rencana anggaran (Surya & Darwanis, 2015).

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah, pendapatan Provinsi Papua Barat beberapa tahun terakhir didominasi oleh Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Tabel 1 realisasi pendapatan Provinsi Papua Barat tahun 2016-2020 menunjukkan hal tersebut.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2020

Nomor	Akun	Tahun (Rp 000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN	6 740 386	7 055 394	7 309 838	11 339 763	8 519 361
		626	801	196	890	863
1.1	PAD	338 881	467 075	459 243	483 725 599	485 365
		108	447	073		553
1.2	Pendapatan	3 221 910	3 313 925	2 841 657	6 907 515	4 014 919
	Transfer	435	466	645	332	778
1.3	Pendapatan	3 179 665	3 274 393	4 008 937	3 948 522	4 019 076
	lainnya yang Sah	083	888	478	959	863
2	BELANJA	6 464 612	7 019 061	6 947 065	9 269 298	9 746 946
		242	239	392	181	226
2.1	Belanja Tidak	3 289 955	4 399 869	3 712 614	5 438 078	6 631 716
	Langsung	912	702	601	661	369
2.2	Belanja Langsung	3 174 692	2 619 191	3 234 450	3 831 219	3 115 229
		330	537	791	520	857
	Surplus/(Defisit)	275 774	36 333 562	362 772	2 070 465	(1 227 584
		384		804	709	363)

Sumber : (BPS) Diolah Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat 2016-2020

Selama melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinso Papua Barat, Realisasi Total Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua Barat surplus dari tahun 2016 hingga 2019, namun terjadi defisit -1,2 triliun pada tahun 2020. Dengan demikian, tabel realisasi selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa

penerimaan pendapatan dari PAD mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2020, namun jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer dan pendapatan sah lainnya. Karena Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah (Siregar, 2019). Sehingga semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat (Adriani & Yasa, 2015). Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim & Kusufi, 2012).

Isu-isu yang menghambat Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan PAD-nya adalah kurangnya sumber daya ASN dalam pelayanan publik, fasilitas yang kurang memadai, potensi sumber pendapatan asli daerah kurang dimanfaatkan, dan kurangnya pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana dapat dilihat, persoalan-persoalan tersebut akan memudahkan para Stacholder untuk memutuskan strategi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan PAD Provinsi Papua Barat, tujuan penelitian yang akan dituliskan adalah I menganalisis rasio kemandirian; (ii) dan (iii) merumuskan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD Provinsi Papua Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hakim et al., 2018) menyatakan bahwa efektivitas PAD Kepulauan Anambas berfluktuasi antara tahun 2011 dan 2015, dengan efisiensi PAD kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan, sedangkan rasio kemandirian daerah dalam kategori rendah. Fokus strategi utama Kabupaten Anambas untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi PAD, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Aituarauw, 2022) menyatakan bahwa selama pandemic covid 19 badan pendapatan daerah menggunakan strategi guna meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah pada anggaran belanja di kabupaten kaimana propinsi papua barat. untuk mengatasi kendala dalam peningkatannya, badan pendapatan asli daerah bekerja keras untuk menyusun strategi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penulis penelitian ini melakukan beberapa penelitian yang sebelumnya tidak dilaporkan, dengan tujuan untuk untuk merinci kekuatan dan strategi Pemerintah Provinsi Papua Barat. Fokus perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dituliskan terletak pada tempat penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis rasio yang digunakan untuk menghitung kemandirian keuangan daerah dalam merumuskan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di Pemerintah Kabupaten Barat. PAD sedang meningkat di Provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan di Provinsi Papua Barat, dengan pemahaman bahwa wilayah ini memiliki sumber daya yang potensial untuk menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif (Sugiyono, 2017). Data sekunder digunakan untuk mendukung penulisan ini didapatkan dari hasil riset tahunan Badan Pusat Statistik tentang Statistik Keuangan Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2020. Rasio kemandirian tertulis dalam aturan Kepmendagri nomor 690.900.327 tahun 1996 merupakan alat analisis keuangan daerah yang digunakan. Sedangkan pendekatan literatur yang digunakan dalam penulisan ini yaitu artikel/jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian dan permasalahan yang ditulis. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan peneliti untuk memberikan gambaran kondisi penelitian berdasarkan fakta lapangan, prosedur selanjutnya dengan menggunakan teori akan dilakukan analisis secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat

Tabel tersebut menampilkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat periode 2016-2020.

**Tabel 2 Ratio Kemandirian keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat
Periode 2016-2020**

Tahun Anggaran	PAD (Rp 000)	Pendapatan Transfer (Rp 000)	RKKD (%)	Keterangan
2016	338 881 108	3 221 910 435	10,52	Rendah Sekali
2017	467 075 447	3 313 925 466	14,09	Rendah Sekali
2018	459 243 073	2 841 657 645	16,16	Rendah Sekali
2019	483 725 599	6 907 515 332	7,00	Rendah Sekali
2020	485 365 553	4 014 919 778	12,09	Rendah Sekali

Sumber : BPS, Publikasi Statistik Keuangan Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2020

Strategi Provinsi Papua Barat untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Jika dibandingkan dengan pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah lainnya, komponen pendapatan asli daerah relative lebih kecil. Menurut laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi yang paling efektif sebagai upaya menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman). Faktor eksternal mewakili peluang, sedangkan faktor internal mewakili kelemahan dan ancaman (*Threats*).

Kekuatan (*Strenght*)

Pajak dan retribusi daerah diatur dalam Perda Provinsi Papua Barat No 12 tahun 2012 tentang retribusi daerah dan Peraturan daerah No 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. System informasi pajak dan retribusi daerah tersedia secara online, sehingga masyarakat tidak perlu bingung dalam membayar pajak dan retribusi yang dilakukan di daerah sehingga pengelolaannya berjalan dengan baik.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Peraturan pajak dan retribusi daerah, yang harus disesuaikan dengan kondisi setempat, harus diperbarui. Sanksi atas pelanggaran wajib pajak dan retribusi belum dilaksanakan secara optimal. Walaupun potensi daerah cukup besar, sumber daya manusia masih terbatas kemampuannya untuk menggalinya.

Peluang (*Opportuinies*)

BPHTB dan PBB dialihkan dari pusat ke daerah setelah disahkannya UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah propinsi Papua Barat. Eksekutif dan legislative membantu instansi terkait, dalam hal ini dinas pendapatan daerah. Secara geografis propinsi papua barat menjadi daya Tarik yang cukup aman bagi para investor untuk menanamkan modalnya dan mengembangkannya di sana. Selain itu, hal tersebut dapat terjalin kerja sama yang baik antar pemangku kepentingan.

Ancaman (*Threats*)

Kesadaran para pelaku wajib pajak dalam mematuhi pembayaran tepat waktu serta melaporkan kewajibannya dalam pajak daerah dengan valid masih rendah. Pemberlakuan sanksi bagi para wajib pajak secara keseluruhannya belum berjalan dengan baik, akibatnya, wajib pajak dapat menggunakan celah tersebut untuk menghindari pelaporan dan pembayaran pajak daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat, yaitu Masih terbatasnya sumberdaya ASN dalam pelayanan publik, sarana dan prasana yang belum memadai, belum memadainya pengalihan potensi dari pendapatan asli daerah yang dimiliki, pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien. Berdasarkan keempat permasalahan tersebut di atas, inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggunakan analisis SWOT antara lain memerlukan pengembangan strategi yang tepat untuk

mengatasi hambatan tersebut diantaranya adalah pemerintah harus meningkatkan pelatihan dan pembinaan bagi ASN terkait secara sistematis dan berjangka panjang. Mamfaatkan teknologi yang ada untuk berinovasi, menggali sumber pendapatan, dan adanya sosialisasi rutin dari pemerintah kepada wajib pajak terkait sistem informasi agar mudah dipahami guna meningkatkan PAD Provinsi Papua Barat.

Upaya di atas lebih lanjut, merupakan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Berdasarkan temuan penelitian, penulis menemukan adanya kendala, seperti keterbatasan sumber daya ASN dalam pelayanan publik, sarana dan prasarana yang belum mencukupi, kurang tergalinya potensi sumber pendapatan daerah yang dimiliki, dan kurang berkembangnya sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.. Akibatnya, komponen Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat tidak selalu berjalan dengan baik secara finansial. Karena dampak PAD relatif kecil, pembangunan daerah tetap sepenuhnya bergantung pada pendapatan transfer dan pendapatan lain yang sah. Hasil analisis Kemandirian Finansial Provinsi Papua Barat menunjukkan kemampuan daerah untuk mengelola dan menggali sumber daya daerah belum mencapai puncaknya, sehingga diperlukan strategi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD Propindi Papua Barat

KESIMPULAN

Beberapa rekomendasi dibuat berdasarkan beberapa temuan artikel dalam peningkatan Pendapatan asli daerah Propinsi Papua Barat 2016-2020 diantaranya adalah hasil analisis Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD masih rendah, sehingga proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui analisis SWOT perlu adanya perbaikan dan peningkatan yang terus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan PAD. Melalui sosialisasi kepada para wjib pajak akan kesadaran membayar pajak, peningkatan kemampuan SDM ASN melalui pelatihan atau kursus dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan bidang yang dimiliki, memanfaatkan teknologi yang ada, serta menggali sumber daya alam yang dimiliki daerah guna meningkatkan PAD

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, N. L. G. C., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(11), 44579.
- Aituarauw, I. F. A. (2022). *Skripsi Ilham Faried Arrahman Aituarauw_29. 1888_Strategi Bapenda Dalam Meningkatkan Kontribusi Pad Terhadap Apbd Saat Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Kaimana*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Hakim, M., Sarma, M., & Harianto, H. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Teori konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik (Jilid 1). *Jakarta Selatan: Salemba Empat*.
- Kainde, C. (2013). Analisis varians dan pertumbuhan belanja daerah pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Mangowal, J. C. (2013). Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302(2013), 164.

- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Sa'diyah, H., & Putri, Y. T. (2015). Pengaruh PAD terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 4(1), 44–53.
- Samad, R. P., & Iyan, R. Y. (2013). Analisis potensi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 3(8), 103–122.
- Siregar, E. A. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 160–170.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, A., & Darwanis, S. A. (2015). Pengaruh sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (Studi pada Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(3).
- Wijayanti, Y., & MM, A. (2017). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.